BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum atau yang lebih dikenal pemilu merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis. Proses ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, pemilu diatur oleh Undang-Undang dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan transparan.

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem politiknya (Satya 2023) . Perubahan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Masyarakat kini memiliki hak untuk memilih dan dipilih, yang merupakan inti dari partisipasi politik. Pemilu bukan hanya sekadar alat untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Melalui pemilu, masyarakat dapat menentukan arah pembangunan, kebijakan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, pemilu menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin yang telah terpilih, memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau mengganti mereka jika kinerjanya tidak memuaskan.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat secara langsung memilih pemimpin di tingkat lokal, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Sejak diterapkannya Pilkada langsung pada tahun 2005, proses ini menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat

Strategi Kampanye.., Umie Astuti, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

desentralisasi dan demokrasi di Indonesia, sejalan dengan Pemilu di tingkat nasional. Pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap paling mampu memahami dan menangani persoalan di daerah mereka. Sama halnya dengan Pemilu, Pilkada berperan penting dalam memastikan bahwa kekuasaan eksekutif di tingkat daerah dipegang oleh individu-individu yang mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui proses demokratis. Pilkada berkaitan erat dengan Pemilu secara keseluruhan karena keduanya mencerminkan proses yang demokratis untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan.

Dalam Pilkada, rakyat memilih kepala daerah yang akan menjadi pengambil kebijakan utama di tingkat lokal, sementara Pemilu legislatif memilih anggota DPRD yang akan berfungsi sebagai pengawas dan pembuat undang-undang di daerah. Kombinasi antara hasil Pilkada dan Pemilu legislatif membentuk dasar pemerintahan daerah yang efektif dan representatif, dengan kepala daerah dan anggota DPRD yang berperan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Pilkada juga memegang peranan penting dalam pengembangan demokrasi lokal karena kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan anggaran daerah. Dalam konteks desentralisasi yang diterapkan di Indonesia, keberhasilan Pilkada menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pilkada dan Pemilu secara keseluruhan tidak hanya menjadi simbol dari kedaulatan rakyat, tetapi juga instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan. (Suyatno 2016)

Sejarah baru Pilkada di Indonesia dimulai pada tahun 2005, ketika untuk pertama kalinya pemilihan kepala daerah dilakukan

secara langsung oleh rakyat. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pilkada langsung respons atas tuntutan masyarakat yang menginginkan sistem yang lebih demokratis, di mana mereka dapat memilih kepala daerah secara langsung tanpa campur tangan politik elit di DPRD. Menurut (Rahmaniah 2021) Penerapan Pilkada langsung ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, karena memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka di tingkat lokal.

Setelah diperkenalkannya Pilkada langsung pada tahun 2005, implementasinya terus mengalami penyempurnaan. Pilkada langsung membawa sejumlah tantangan, seperti biaya kampanye yang tinggi, politik uang, serta sengketa hasil Pilkada. Namun, di sisi lain, Pilkada langsung juga berhasil memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan meningkatkan akuntabilitas para kepala daerah terpilih, karena mereka secara langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Meski ada tantangan, Pilkada langsung tetap dipandang sebagai kemajuan demokrasi di Indonesia.

Pada tahun 2014, muncul kontroversi ketika DPR mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014, yang mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Keputusan ini mendapat penolakan luas dari masyarakat dan berbagai kalangan, yang menilai bahwa kembalinya pemilihan tidak langsung adalah langkah mundur bagi demokrasi Indonesia. Tekanan publik yang besar akhirnya mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang membatalkan undang-undang tersebut dan memastikan Pilkada langsung tetap dilanjutkan.

Pada tahun 2015, pemerintah memperkenalkan sistem Pilkada serentak sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkada. Dalam sistem ini, Pilkada di berbagai

daerah dilakukan secara bersamaan pada satu waktu. Pilkada serentak pertama diselenggarakan pada Desember 2015, yang melibatkan lebih dari 260 daerah. Pilkada serentak ini dianggap sebagai salah satu langkah maju dalam penyederhanaan proses politik dan memastikan adanya konsistensi dalam pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah indonesia. Hingga saat ini, Pilkada terus berkembang menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki kesempatan langsung untuk memilih pemimpin lokal mereka. Pilkada memainkan peran penting dalam memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Meski tantangan seperti politik uang dan korupsi tetap ada, Pilkada telah membuktikan dirinya sebagai salah satu mekanisme yang paling penting dalam memastikan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel di tingkat lokal.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu Pilkada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pilkada Gubernur adalah proses pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sebagai pemimpin daerah tingkat provinsi, di mana gubernur bertanggung jawab atas kebijakan di seluruh wilayah provinsi yang mencakup beberapa kabupaten dan kota. Pemilihan ini dilakukan setiap lima tahun sekali. Selanjutnya, Pilkada Bupati merupakan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten, di mana rakyat memilih bupati dan wakil bupati yang akan memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di seluruh wilayah kabupaten selama lima tahun. Di tingkat kota, Pilkada Wali Kota diselenggarakan untuk memilih wali kota dan wakil wali kota sebagai pemimpin daerah, dengan tugas yang serupa dengan bupati, namun dalam skala wilayah yang lebih kecil. Selain itu, Indonesia juga menerapkan mekanisme Pilkada Serentak, di mana pemilihan kepala daerah

dilakukan secara bersamaan di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pilkada serentak mulai diterapkan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan anggaran, serta meminimalkan praktik politik uang melalui periode kampanye yang lebih singkat di berbagai daerah.

Pilkada merupakan salah satu tahap penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Proses pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan kunci yang dijalankan dengan aturan yang ketat guna memastikan pemilihan berlangsung secara transparan dan adil. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup pendaftaran pemilih, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui pencocokan dan penelitian data penduduk, serta verifikasi untuk memastikan pemilih memenuhi syarat. Selain itu, pada tahap ini dilakukan pendaftaran calon, baik dari partai politik maupun independen, disertai dengan penyerahan berkas pendaftaran yang diverifikasi oleh KPU untuk memastikan kelayakan calon. Tahap kedua adalah Kampanye, di mana calon kepala daerah memperkenalkan diri, menyampaikan visi, misi, serta program kerja mereka melalui berbagai strategi, seperti pertemuan tatap muka dan kampanye digital. Pada tahap ini, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi kampanye untuk memastikan sesuai dengan aturan, termasuk pembatasan dana kampanye dan larangan politik uang. Tahap ketiga adalah Hari pemungutan suara, yang merupakan puncak dari seluruh proses Pilkada. Pada hari ini, pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara mereka. Setelah TPS ditutup, dilakukan penghitungan suara secara terbuka yang dilaporkan ke KPU, di mana hasil akhirnya diumumkan. Jika tidak ada sengketa atau pelanggaran, calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang, dan apabila ada sengketa, proses penyelesaiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

Pilkada Kota Bekasi adalah proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang berlangsung setiap lima tahun sekali. Kota Bekasi, yang merupakan bagian dari wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), menjadi salah satu kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan pertumbuhan populasi yang pesat. Dengan populasi yang terus meningkat, Pilkada di kota ini memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah dan kebijakan publik. Proses pemilihan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengekspresikan suara mereka, tetapi juga menjadi sarana untuk menilai kinerja para pemimpin sebelumnya dan menentukan masa depan kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada Kota Bekasi telah dilakukan secara langsung. Sebelumnya, pemilihan wali kota dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang membatasi partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin mereka. Namun, setelah reformasi politik, pelaksanaan Pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya pemilihan langsung, masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan publik. Bentuk dari adanya keterlibatan masyarakat dalam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi. Menurut Iqbal Syahfrudin (2022:101)

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang signifikan, salah satunya adalah Politik uang, yang menjadi masalah utama dalam menjaga integritas demokrasi lokal. Politik uang terjadi ketika kandidat atau tim suksesnya memberikan uang atau sebagai hadiah untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Praktik ini merusak integritas pemilihan karena pemilih sering kali tidak memilih berdasarkan visi, misi, atau program kerja calon, melainkan karena insentif materi. Menurut (Simamora 2011) hal ini

berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten dan integritasnya diragukan. Dalam jangka panjang, politik uang dapat memperburuk budaya korupsi, di mana pemimpin yang terpilih merasa perlu "mengembalikan modal" selama masa jabatannya, yang berdampak pada pembangunan daerah dan meningkatkan risiko korupsi dalam pemerintahan. Selain itu, tantangan Partisipasi pemilih juga memengaruhi legitimasi hasil Pilkada. Partisipasi yang rendah sering kali disebabkan oleh rendahnya kesadaran politik, di mana masyarakat merasa suaranya tidak berpengaruh atau tidak memahami pentingnya Pilkada. Aksesibilitas ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sulit dijangkau, terutama di daerah terpencil, serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung, seperti beban pekerjaan atau kerentanan terhadap politik uang, juga berkontribusi pada rendahnya partisipasi. Tidak hanya itu, Sengketa hasil Pilkada menjadi tantangan lain yang sering muncul, terutama ketika salah satu pihak merasa hasil pemilu tidak adil. Konflik yang berlarut-larut, biasanya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK), dapat memicu ketidakstabilan politik di daerah, mengganggu pelantikan kepala daerah terpilih, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta penyelenggara pemilu. Ini pada gilirannya dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di masa depan.

Jamil, S.E., S.Sos. sebagai calon anggota DPRD di Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, menerapkan berbagai strategi kampanye yang menggabungkan metode tradisional dan modern guna menjangkau beragam segmen pemilih. Dalam upayanya meraih dukungan, Jamil, S.E., S.Sos. secara konsisten menggunakan pendekatan kampanye tatap muka dengan melakukan kunjungan ke beberaapa wilayah, seperti pemukiman warga, serta acara-acara publik. Kampanye tatap muka ini memungkinkan Jamil, S.E., S.Sos. mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan memperkenalkan programnya secara personal, yang memberikan kesan kedekatan serta

membangun kepercayaan pemilih. Selain itu, Jamil aktif terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas, seperti bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang memperkuat hubungannya dengan berbagai kelompok di Kabupaten Bekasi dan menciptakan citra positif sebagai calon yang peduli terhadap kesejahteraan warga.

Strategi kampanye yang digunakan Jamil, S.E., S.Sos. terbukti efektif dalam membangun loyalitas pemilih lokal. Pendekatan tatap muka menciptakan ikatan emosional yang kuat, memungkinkan konstituen merasa aspirasinya didengar dan dihargai secara langsung. Selain itu, keterlibatan Jamil, S.E., S.Sos. dalam berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga berdampak positif pada elektabilitasnya, dengan semakin banyak komunitas yang merasa dilibatkan secara langsung dalam program-programnya. Partisipasi aktif ini juga memperkuat dukungan dari berbagai kalangan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Strategi kampanye Jamil, S.E., S.Sos. yang mengutamakan pendekatan langsung dan kehadiran aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, serta olahraga berhasil memperkuat citra positifnya di mata publik. Kehadirannya dalam berbagai acara ini membangun ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat dan menciptakan kesan sebagai figur yang responsif dan peduli. Dengan melibatkan diri secara aktif, Jamil, S.E., S.Sos. juga memperluas dukungannya dari berbagai kalangan, termasuk komunitas agama, pemuda, serta kelompok yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, sehingga semakin dipercaya sebagai calon yang mengutamakan kepentingan warga.



Gambar 1. 1 Strategi Kampanye Jamil, S.E., S.Sos. melalui pekan olahraga

Sumber; https://alfudhola.blogspot.com/2013/02/m-jamil-mengajak-masyarakat.html



Gambar 1. 2 Strategi kampanye Jamil, S.E., S.Sos. melalui kegiatan keagamaan

Sumber; https://alfudhola.blogspot.com/2013/02/m-jamil-mengajak-masyarakat.html

Strategi kampanye tatap muka atau *Direct Mass Campaign* yang diterapkan oleh Jamil, S.E., S.Sos. dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Bekasi 2024 diwujudkan melalui sosialisasi tatap muka dengan masyarakat di berbagai kecamatan. Dalam setiap pertemuan, Jamil, S.E., S.Sos. menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya sambil mendengarkan secara langsung aspirasi serta keluhan warga. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat hubungan personal antara Jamil, S.E., S.Sos. dan para pemilih, tetapi juga memungkinkan mereka untuk lebih memahami secara mendalam platform politik yang ditawarkan. Dengan demikian, pemilih merasa lebih dekat dan dapat melihat secara jelas relevansi visi dan misi Jamil, S.E., S.Sos.

dengan kebutuhan mereka, sehingga diharapkan meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadapnya.

Dalam strategi *Door-to-door Campaign*, tim kampanye Jamil, S.E., S.Sos. melakukan kunjungan ke warga sekitar, memperkenalkan Jamil, S.E., S.Sos. secara pribadi kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, Jamil, S.E., S.Sos. ingin memastikan bahwa pesan dan program kampanyenya dapat diterima langsung oleh masyarakat. Dengan berinteraksi langsung, tim Jamil, S.E., S.Sos. juga dapat memahami kebutuhan khusus setiap individu serta menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin ada secara lebih personal. Pendekatan ini memberikan sentuhan langsung yang dapat meningkatkan kepercayaan pemilih, serta menunjukkan kesungguhan Jamil, S.E., S.Sos. dalam merangkul berbagai lapisan masyarakat. (Syafrudin dan Casmana 2022)

Meskipun kampanye digital semakin marak digunakan, Jamil, S.E., S.Sos. memilih untuk lebih fokus pada interaksi langsung. Pilihan ini didasarkan pada karakteristik pemilih di Kabupaten Bekasi yang sebagian besar lebih menghargai kedekatan emosional dan komunikasi langsung daripada pendekatan digital. Keberhasilannya dalam menarik perhatian pemilih juga didukung oleh konsistensinya dalam mendengarkan dan menanggapi kebutuhan masyarakat.

Era modern telah membawa perkembangan teknologi yang mendorong banyak kandidat menggunakan kampanye digital melalui media sosial dan platform daring lainnya. Namun, kampanye tatap muka tetap memiliki tempat tersendiri. Interaksi langsung memungkinkan kandidat membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan pemilih, menciptakan kepercayaan yang sulit dicapai melalui layar digital. Kampanye ini juga memberikan ruang untuk dialog dua arah yang lebih personal, yang sangat dihargai oleh masyarakat tertentu.

Dalam memilih lokasi penelitian, Desa Mangun Jaya dan Musholla Al-Fudhola di Kota Bekasi dipilih karena kedua tempat ini merupakan target utama dalam strategi kampanye tatap muka Jamil, S.E., S.Sos. Desa Mangun Jaya, yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, mewakili pemilih dari komunitas pedesaan yang dinamis, di mana interaksi tatap muka sangat dihargai. Sementara itu, Musholla Al-Fudhola di Perumahan Graha Prima menjadi contoh lokasi urban yang lebih terstruktur, dengan fokus pada pendekatan komunitas melalui kegiatan sosial dan diskusi publik. Pemilihan lokasi ini mencerminkan pendekatan Jamil yang berusaha mencakup berbagai segmen pemilih, baik di area pedesaan maupun perkotaan. Lokasi-lokasi ini juga memungkinkan penelitian mendapatkan data yang beragam mengenai efektivitas strategi tatap muka di berbagai konteks masyarakat.

Namun, strategi tatap muka juga memiliki tantangan, seperti membutuhkan sumber daya waktu dan tenaga yang besar. Meski demikian, Jamil mampu mengatasi tantangan ini dengan manajemen waktu yang baik dan dukungan tim kampanye yang solid. Keberhasilannya menunjukkan bahwa komunikasi personal masih menjadi elemen penting dalam politik, terutama dalam membangun hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan dengan pemilih.

Respons masyarakat terhadap strategi kampanye tatap muka Jamil, S.E., S.Sos. di Pilkada Kabupaten Bekasi menunjukkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Masyarakat menilai kredibilitas Jamil, S.E., S.Sos. berdasarkan interaksi langsung selama kampanye tatap muka, di mana mereka merasa lebih dekat dan yakin bahwa Jamil, S.E., S.Sos. memahami serta peduli terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Program-program kerja yang disampaikan Jamil, S.E., S.Sos. juga menargetkan isu-isu utama yang menjadi perhatian warga, seperti infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan sosial, yang disambut baik oleh masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat

dalam kampanye Jamil, S.E., S.Sos. pun cukup tinggi, dengan warga aktif mengikuti diskusi dan acara yang diadakan. Hal ini menunjukkan adanya dukungan kuat serta keyakinan bahwa Jamil, S.E., S.Sos. dapat membawa perubahan yang diharapkan di Kabupaten Bekasi.

Jamil, S.E., S.Sos. terpilih kembali dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Bekasi 2024 karena kemampuannya memanfaatkan strategi kampanye tatap muka secara efektif. Pendekatan ini memungkinkan dia untuk menjalin komunikasi yang lebih personal dan mendalam dengan konstituennya, membangun kepercayaan, serta memperkuat loyalitas pemilih. Selain itu, kedekatannya dengan masyarakat, pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan lokal, dan rekam jejak kinerjanya selama periode sebelumnya menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilannya. Meskipun tidak menggunakan media sosial, fokus pada pendekatan tatap muka berhasil menjangkau pemilih yang merasa dihargai melalui interaksi langsung.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi kampanye tatap muka yang diterapkan oleh Jamil, S.E., S.Sos. dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pemilih di Kabupaten Bekasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaiamana strategi kampanya tatap muka Jamil, S.E., S.Sos. dapat membangun kepercayaan publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Menganalisis strategi kampanye tatap muka yang diterapkan oleh Jamil, S.E., S.Sos. dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Bekasi 2024, khususnya dalam membangun hubungan emosional dengan pemilih, menyampaikan pesan politik yang relevan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi lokal.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tentang strategi kampanye politik yang efektif dalam konteks pemilihan legislatif di indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan langsung dan keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

1.5.2. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi calon peneliti atau praktisi komunikasi politik untuk mengembangkan strategi kampanye inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.